

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹

Dalam mengerjakan kepentingan bersama tersebut atau mempunyai kepentingan bersama, orang akan bergabung dalam suatu organisasi (perusahaan) yang bertujuan memperjuangkan kepentingan atau dibentuk untuk menolong diri mereka secara bersama-sama dalam bidang kemanfaatan untuk agama, umat dalam manusia, karena hal tersebut merupakan konsep agama bagi kehidupan manusia.

Hidup manusia pada umumnya diakui sangat tinggi nilainya, itulah sebabnya makin banyak manusia dalam kenyataan hidup di dunia tidak terlepas dari berbagai risiko kehidupan yang dapat menimbulkan kehilangan, kerugian ataupun berkurangnya nilai harta benda atau kepentingannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dan tidak seorang pun mengetahui sebelumnya, karena itu diperlukan upaya untuk berhati-hati dalam menentukan penggantian agar standar hidup dan kegiatan tidak tertanggung atau hilang sama sekali. Risiko yang dihadapi dalam kehidupan bisa berupa kematian, kecelakaan, dan bencana alam atau rusaknya harta benda yang dimiliki.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 157

menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia mengatasi risiko dengan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya sudah dikenal oleh peradaban manusia, baik di dunia bagian Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi.²

Pada awalnya, ada suatu kelompok manusia yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Dari sini timbul suatu konsep yaitu persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil yang tidak terduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang di antara mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka, yang selanjutnya disebut asuransi.³

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut bisa menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, h. 3

³ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, h.3

salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.⁴

Asuransi menurut Undang- Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Bab 1 pasa 1 ” asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Islam memandang “pertanggungan” sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan kata yang dipakai oleh Moh. Ma’sum Billah untuk mengartikan “pertanggungan” dengan kata, yang mempunyai arti “*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety*” (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung). Secara definitif, Hasan, sebagaimana dikutip “*takāful*” dengan *mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one’s life, property or any form of valuable things* (jaminan bersama yang

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, h.3

pihak penanggung kepada tertanggung, apabila ia menderita suatu kerugian akan mendapatkan ganti kerugian.

Asuransi sebagai alat peralihan risiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan pada pihak lain (penanggung). Peralihannya dapat diikat dengan suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang dapat berposisi sebagai tertanggung bisa individu atau perorangan, kelompok orang atau suatu institusi, dan bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga atau institusi.⁷

Perusahaan asuransi, kegiatan yang cukup luas dan kompleks karena tidak hanya mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain dan nanti pada suatu waktu harus membayar klaim, tetapi secara teoritis operasional perusahaan asuransi harus dapat mencapai jumlah besar dan mampu menginvestasikan dana guna menghadapi biaya eksploitasi serta untuk menghimpun dana cadangan guna menghadapi klaim-klaim yang juga semakin luas.⁸

Usaha yang bisa digunakan untuk menanggulangi risiko dalam asuransi jiwa dapat dijalankan dengan berbagai cara. Terutama pihak pimpinan perusahaan

⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, h. 72

⁸ *Ibid*, h. 195

harus memperhatikan terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan agar klaim bisa diperkecil.⁹

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi, mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan harus membayar kepada setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai perjanjian. Jadi, karena perjanjian asuransi yang telah diadakan dengan para tertanggung sebagai nasabah, perusahaan harus tetap bersedia memenuhi tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi dari nasabah.

Menurut Undang-Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dapat melakukan kegiatan pertanggung jiwa hanyalah perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan. Jasa yang diberikan oleh asuransi jiwa berkaitan erat dengan ketidakpastian produktivitas ekonomis manusia, misalnya, kematian, PHK, kemungkinan mengalami cacat. Karena alasan ketidakpastian itulah orang rela membayar sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan polis asuransi jiwa. Manfaat yang dapat diperoleh oleh asuransi jiwa antara lain:

1. Santunan bagi tertanggung yang meninggal
2. Cadangan dana untuk pensiun
3. Menghindari pajak pendapatan.¹⁰

⁹ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 32

¹⁰ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.154

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah asuransi jiwa sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Salah satunya tentang komparasi asuransi jiwa pemikiran Murthadha Muthari dan Sayyid Sabiq¹¹ dengan menitikberatkan pada perbandingan asuransi jiwa Menurut Murthadha Muthari, asuransi diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan agama (bukan perjudian) dan Menurut Sayyid Sabiq asuransi termasuk perjudian karena hak milik bergantung pada musibah yang terjadi, tinjauan Hukum Islam terhadap masalah terhentinya pembayaran premi asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumi Putera Sidoarjo¹² yang isinya, menurut Hukum Islam penunggakan yang disengaja termasuk dhalim, tapi jika tidak sengaja maka diberi keringan sampai mampu membayar. Sedangkan untuk pembayaran uang pertanggungan (klaim) asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri belum pernah dibahas dan diteliti. Sehingga pada kesempatan ini penulis hendak mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim

¹¹ Di tulis oleh Cicik Indarawara Susilowati, Fakultas Syari'ah, Tahun 2005

¹² Di tulis oleh Nurul Hasanah, Fakultas Syariah, Tahun 1998

3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan hukum asuransi.

F. Definisi Operasional

Dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)” akan disajikan tentang prosedur pembayaran klaim asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, kiranya lebih dahulu perlu ditegaskan maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur’an dan Hadits,¹³ dan hasil Ijtihad para ulama.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.¹⁴

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁵

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411

¹⁴ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 25

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, h. 223

